

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

e-mail : info@pn-makassar.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

e-mail : info@pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Makassar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MAKASSAR, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Drs. H. BAHAR MATTALIU, SH
NIP. 19591003 198311 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	21
A. Penjelasan Umum.....	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar.....	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi.....	24
A.5. Dasar Pengukuran.....	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	36
C.1. Aset Lancar.....	36
C.2. Aset Tetap.....	38
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	43
C.6. Ekuitas.....	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45
D.2. Beban Pegawai.....	45

D.3.	Beban Persediaan.....	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	46
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	47
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	49
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	50
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	51
D.13.	Pos Luar Biasa	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
E.1.	Ekuitas Awal	52
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	52
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset.....	52
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	52
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	53
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	53
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	53
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	54
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	54
E.3.	Ekuitas Akhir.....	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	55
	Laporan-laporan Pendukung	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	58
	Daftar Hibah Langsung.....	61

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018	11
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019 dan 2018	32
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019	33
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019	33
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	34
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	34
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	36
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018	36
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka	37
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018	38
Tabel 25 Rincian Aset Tetap	38
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel 1 Rincian Aset tak Berwujud	43
Tabel 2. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018	44
Tabel 3 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019	59
Tabel 4 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	62
Tabel 5 Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaL	63

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Makassar

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667 e-mail : info@pn-makassar.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

MAKASSAR, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Drs. H. BAHAR MATTALIU, SH.
NIP. 19591003 198311 1 001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 7.508.400 atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 10.975.606.661 atau mencapai 53,93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20.351.415.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	TA 2019		TA 2018
		Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	7.508.400	0,00	16.431.218
Belanja Negara	20.351.415.00	10.975.606.661	53,93	10.982.353.146

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 309.123.875.902, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 83.328.755; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 309.038.672.147; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 1.875.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 50.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 309.073.875.902.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2019	2018	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	83.328.755	52.109.945	31.218.810	59,90
Aset Tetap	309.038.672.147	299.102.905.227	9.935.766.920	3,32
Aset Lainnya	1.875.000	2.500.000	(625.000)	(25,00)
Jumlah Aset	309.123.875.902	299.157.515.172	9.966.360.730	3,33
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	50.000.000	41.491.869	8.508.131	20,50
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	50.000.000	41.491.869	8.508.131	20,50
Ekuitas Dana				
Ekuitas	309.073.875.902	299.116.023.303	9.957.852.599	3,32
Jumlah Ekuitas Dana	309.073.875.902	299.116.023.303	9.957.852.599	3,32
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	309.123.875.902	299.157.515.172	9.966.360.730	3,33

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 7.508.400,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 12.460.364.539, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (12.452.856.139) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 576.600 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (12.452.279.539).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 299.116.023.303 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (12.452.279.539) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 22.410.132.138 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 309.073.875.902.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	7.508.400	0,00	16.431.218
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	7.508.400	0,00	16.431.218
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	17.656.625.000	9.979.279.341	56,52	10.220.838.499
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.505.790.000	996.327.320	39,76	761.514.647
3.	Belanja Modal	B.2.3.	189.000.000	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		20.351.415.000	10.975.606.661	53,93	10.982.353.146

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1 1.	50.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1 2.	0	0
Persediaan	C.1 3.	33.390.255	52.109.945
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 3.	(61.500)	0
Jumlah Aset Lancar		83.328.755	52.109.945
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	244.304.329.000	239.617.817.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	8.159.339.995	8.065.248.617
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	68.316.866.900	61.576.269.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	162.196.469	162.196.469
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(11.904.060.217)	(10.318.625.859)
Jumlah Aset Tetap		309.038.672.147	299.102.905.227
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	5.000.000	5.000.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(3.125.000)	(2.500.000)
Jumlah Aset		309.123.875.902	299.157.515.172
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	50.000.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga		0	41.491.869
Jumlah Kewajiban		50.000.000	41.491.869
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	309.073.875.902	299.116.023.303
Jumlah Ekuitas Dana		309.073.875.902	299.116.023.303
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		309.073.875.902	299.116.023.303

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	7.508.400	16.429.385
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D.2	9.979.279.341	10.081.829.297
Beban Persediaan	D.3	69.612.990	33.493.278
Beban Barang dan Jasa	D.4	648.517.298	585.491.161
Beban Pemeliharaan	D.5	201.703.153	81.134.060
Beban Perjalanan Dinas	D.6	54.359.800	50.415.531
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.506.891.957	1.438.685.972
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
Jumlah Beban		12.460.364.539	12.271.050.299
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(12.452.856.139)	(12.254.620.914)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		633.700	55.958
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		57.100	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		576.600	55.958
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(12.452.279.539)	(12.254.564.956)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Ekuitas Awal	E. 1	299.116.023.303	301.593.836.149
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(12.452.279.539)	(12.254.564.956)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	22.410.132.138	10.965.921.928
Ekuitas Akhir		309.073.875.902	300.305.193.121

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah "Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung", yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain,

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
4. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati,
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Makassar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penerimaan/pendaftaran dan pemeriksaan perkara,
2. Meningkatkan penyelesaian permohonan,
3. Meningkatkan penyelesaian perkara,
4. Meningkatkan akseptabilitas pengelolaan penyelesaian perkara,
5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap teradilan (aces to justice),
7. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
7.508.400

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 7.508.400 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7.508.400	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	7.508.400	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. (8.968.818) atau (54,40) persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Makassar;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.508.400	10.792.025	(3.283.625)	30,42
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	5.673.360	(5.673.360)	0
3.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.833	(1.833)	0

Total Pendapatan 7.508.400 16.467.218 (8.968.818) (54,40)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
10.975.606.661

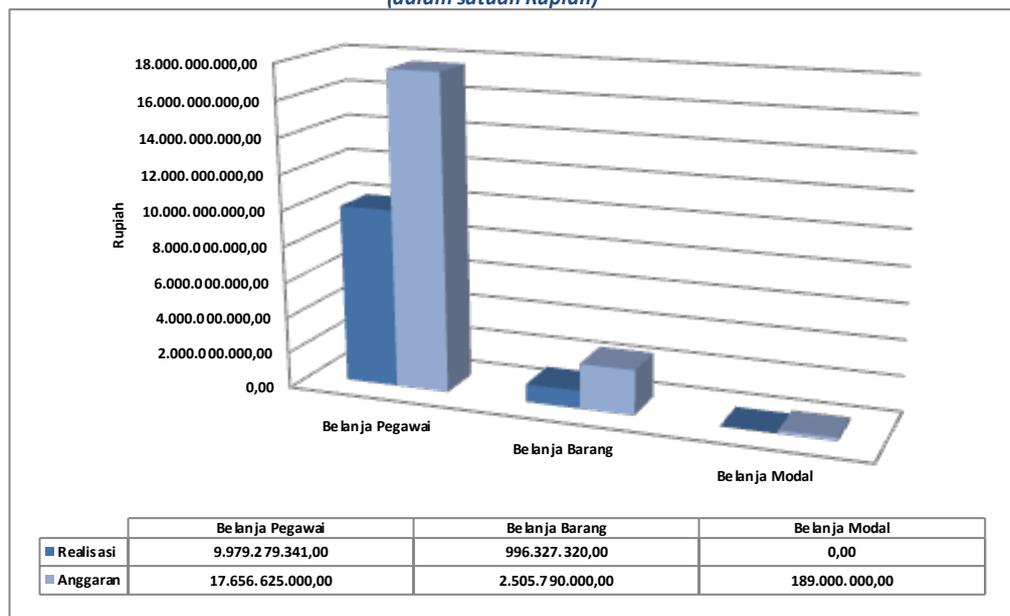
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 10.975.606.661 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 53,93% dari anggaran senilai Rp. 20.351.415.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	17.656.625.000	9.979.284.820	56,52
Belanja Barang	2.490.280.000	989.177.320	39,72
Belanja Modal	189.000.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	20.351.415.000	10.983.649.299	53,93
Pengembalian Belanja		(5.479)	0
Total Belanja Netto	21.030.800.000	10.982.353.146	53,93

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019 & 2018

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. (6.746.485) atau sebesar 0,06 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya realisasi belanja pegawai. Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	9.979.279.341	10.220.838.499	(241.559.158)	(2,36)
Belanja Barang	996.327.320	761.514.647	234.816.673	30,83
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	10.975.606.661	10.982.353.146	(6.742.485)	(0,06)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
9.979.279.341

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 9.979.279.341 dan Rp. 10.220.838.499.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 2,36 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Menurunnya jumlah pembayaran tunjangan fungsional hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.019.962.080	2.901.604.300	118.357.780	4,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	44.401	32.470	11.931	36,74
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198.494.910	197.534.720	960.190	0,48
Beban Tunj. Anak PNS	67.259.990	65.981.906	1.278.084	1,93
Beban Tunj. Struktural PNS	31.935.000	25.515.000	6.420.000	25,16
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.737.030.000	4.233.830.000	(496.800.000)	(11,73)
Beban Tunj. PPh PNS	598.884.059	666.921.356	(68.037.300)	10,20
Beban Tunj. Beras PNS	130.283.580	134.339.100	(4.055.520)	(3,01)

Beban Uang Makan PNS	392.201.000	534.078.000	(141.877.000)	(26,56)
Beban Tunjangan Umum PNS	17.330.000	16.590.000	740.000	4,46
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	194.400.000	221.400.000	(27.000.000)	(12,19)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.591.459.800	1.224.307.800	367.152.000	29,98
Total Belanja Brutto	9.979.284.820	10.222.134.652	(242.849.832)	(2,37)
Pengembalian Belanja	(5.479)	(1.296.153)	(1.290.674)	99,57
Total Belanja Netto	9.979.279.341	10.220.838.499	(241.559.158)	(2,36)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp989.177.320

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 989.177.320 dan Rp. 761.514.647.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar (29,89) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Optimalnya penyerapan belanja barang berupa belanja barang operasional dan langganan Jasa
2. Optimalnya penyerapan belanja pemeliharaan

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019 Realisasi	TA 2018 Realisasi	Perubahan Rp	%
Belanja Barang Operasional	392.447.266	281.284.332	111.162.934	39,51
Belanja Barang Non Operasional	7.150.000	17.295.550	(10.145.550)	(58,65)
Belanja Barang Persediaan	53.607.300	0	53.607.300	0
Belanja Jasa	297.561.901	296.050.484	1.511.417	0,51
Belanja Pemeliharaan	198.351.053	75.022.265	123.328.788	164,38
Belanja Perjalanan Dinas	47.209.800	50.415.531	(3.205.731)	(6,35)
Total Belanja Brutto	989.177.320	761.514.647	227.662.673	29,89
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	989.177.320	761.514.647	227.662.673	29,89

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar :
Rp. 83.328.755

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 83.328.755 dan Rp. 52.109.945.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Juni TA 2019	Desember TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	33.390.255	52.109.945
Persediaan belum diregister	(61.500)	0
Total Aset Lancar	83.328.755	52.109.945

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 50.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan. Kas di Bendahara Pengeluaran saat ini belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca karena masih dikelola oleh Bendahara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Muka dari KPPN	50.000.000	0
Jumlah		50.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	30 Desember TA 2018
1	Belanja dibayar dimuka	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan : Rp. 33.390.255

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 33.390.255 dan Rp. 52.109.945. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	33.390.255	52.109.945
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	33.390.255	52.109.945

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
309.038.672.147

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp. 309.038.672.147 dan Rp. 299.102.905.227. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	244.304.329.000	239.617.817.000	4.686.512.000
2	Peralatan dan Mesin	8.159.339.995	8.065.248.617	94.091.378
3	Gedung dan Bangunan	68.316.866.900	61.576.269.000	6.740.597.900
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	162.196.469	162.196.469	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	320.942.732.364	309.421.531.086	11.521.201.278
	Akumulasi Penyusutan	(11.904.060.217)	(10.318.625.859)	(1.585.434.358)
	Nilai Buku Aset Tetap	309.038.672.147	299.102.905.227	9.935.766.920

C.2.1. Tanah

*Tanah : Rp.
244.304.329.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 244.304.329.000 dan Rp. 239.617.817.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	600	SHP No. 78/1977	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	7.353.000.000
2.	2	397	SHP No. 41/1992	Dep. Kehakiman RI berkedudukan di Jakarta	Rumah Dinas	1.132.244.000
3.	3	900	SHM No. 544/1980	H. Kalamang	Rumah Dinas	13.717.800.000
4.	4	200	SHM No. 674/1982	Hamzy	Rumah Dinas	344.200.000
5.	5	200	SHM No. 675/1982	Hamzy	Rumah Dinas	344.200.000
6.	6	1.440	SHP No. 60/1992	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	2.595.760.000
7.	7	560	SHP. No. 160	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	1.850.240.000
8.	8	1.000	SHP No. 20002/1999	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	3.521.700.000
9.	9	306	SHP No. 387/1994	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	3.893.238.000
10.	10	7.187	SHP No. 59/1992	Dep. Kehakiman RI	Kantor	204.865.435.000
11.	11			Pemerintah RI Cq. MARI	Kantor	4.686.512.000
Jumlah						244.304.329.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 Rp. 244.304.329.000, nilai mutasi tambah sebesar Rp. 4.686.512.000 diperoleh dari transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Makassar berupa tanah untuk gedung kantor yang terletak di Jl. Telkom Mas Raya G/16 dengan BAST Nomor W22.U/1404/KU/4/2019 tanggal 12 April 2019.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
8.159.339.995*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.159.339.995 dan Rp. 8.065.248.617.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	8.065.248.617
Mutasi Tambah	94.091.378
Transfer Masuk	94.091.378
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2019	8.159.339.995
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	7.057.733.301
Nilai Buku 30 Juni 2019	1.101.606.694

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Terdapat mutasi tambah berupa transfer masuk yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset pada Neraca Pengadilan Negeri Makassar transfer masuk berasal dari Mahkamah Agung RI, berupa 1 Unit Server Fujitsu TX1330ME dengan harga perolehan Rp. 94.091.378.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
68.316.866.900*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 68.316.866.900 dan Rp. 61.576.269.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	61.576.269.000
Mutasi Tambah	0
Transfer Masuk	6.740.597.900
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2019	68.316.866.900
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	4.844.826.916
Nilai Buku 30 Juni 2019	63.472.039.984

Realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada semester I Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Terdapat mutasi tambah pada nilai perolehan aset yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset pada Neraca Pengadilan Negeri Makassar, diperoleh dari transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Makassar berupa gedung kantor yang terletak di Jl. Telkom Mas Raya G/16 dengan BAST Nomor W22.U/1404/KU/4/2019 tanggal 12 April 2019.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku 30 Juni 2019	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 162.196.469 dan Rp. 162.196.469.

Realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Lainnya pada semester I Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi keluar pada nilai perolehan aset yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset pada Neraca Pengadilan Negeri Makassar.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	162.196.469
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2019	162.196.469
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	1.500.000
Nilai Buku 30 Juni 2019	160.696.469

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [11.904.060.217]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. (11.904.060.217) dan Rp. (10.318.625.859).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp 5.000.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 5.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang

dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aset Tak Berwujud (anti virus)	5.000.000
	Jumlah Total	5.000.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Makassar berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2019. Realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tak Berwujud pada semester I Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada nilai perolehan aset yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset pada Neraca Pengadilan Negeri Makassar.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 0*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Makassar serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2018	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 50.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok

kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	50.000.000	0
Jumlah	50.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp 50.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
309.073.875.90
2*

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 309.073.875.902 dan Rp. 299.116.023.303. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2019 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 8.508.131 dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 50.000.000, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 41.491.869.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp. 7.508.400 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 7.508.400 dan Rp. 16.429.385. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7.508.400	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
6.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	7.508.400	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 9.979.279.341 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.979.279.341 dan Rp. 10.081.829.297. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.019.962.080	2.897.645.700	122.316.380	4,22
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.922	30.339	8.583	28,29
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198.494.910	196.973.120	1.521.790	0,77
Beban Tunj. Anak PNS	67.259.990	65.777.054	1.482.936	2,25
Beban Tunj. Struktural PNS	31.935.000	25.515.000	6.420.000	25,16

Beban Tunj. Fungsional PNS	3.373.030.000	4.225.430.000	(488.400.000)	(11,55)
Beban Tunj. PPh PNS	598.884.059	665.206.034	(66.321.975)	(9,97)
Beban Tunj. Beras PNS	130.283.580	134.339.100	(4.055.520)	(3,01)
Beban Uang Makan PNS	392.201.000	408.615.150	(16.414.150)	(4,01)
Beban Tunjangan Umum PNS	17.330.000	16.590.000	740.000	4,46
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	194.400.000	221.400.000	(27.000.000)	(12,19)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.591.459.800	1.224.307.800	367.152.000	29,98
Total Beban Pegawai	9.979.279.341	10.081.829.297	(102.549.956)	(1,01)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 69.612.990

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 69.612.990 dan Rp. 33.493.278. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	69.612.990	33.493.278	36.119.712	107,84
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	69.612.990	33.493.278	36.119.712	107,84

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp648.517.298

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 648.517.298 dan Rp. 585.492.161. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dan barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	314.019.903	163.202.600	150.817.303	92,41
Beban Jasa Pos dan Giro	11.751.703	11.649.732	101.971	0,87
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.000.000	18.550.000	5.450.000	29,38
Beban Barang Operasional Lainnya	40.810.660	87.882.000	(47.071.340)	(53,56)
Beban Bahan	0	17.295.550	(17.295.550)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	224.390.162	209.540.174	14.849.988	7,08
Beban Langganan Telepon	8.544.870	12.776.105	(4.231.235)	(33,11)
Beban Sewa	25.000.000	64.596.000	(39.596.000)	(61,29)
Total Beban Barang dan Jasa	648.517.298	585.492.161	63.025.137	10,76

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan : Rp. 201.703.153

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 201.703.153 dan Rp. 81.134.060. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.264.400	2.516.500	114.747.900	4.559
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.086.653	72.505.765	8.580.888	11,83
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	(23.887.000)	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.352.100	6.111.795	(2.759.695)	(45,15)
Total Beban Pemeliharaan	201.703.153	81.134.060	120.569.093	148,60

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 54.359.800

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.359.800 dan Rp. 50.415.531. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan

tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	47.209.800	49.645.531	(2.435.731)	(4,90)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	7.150.000	770.000	6.380.000	828,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	54.359.800	50.415.531	3.944.269	7,82

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 1.506.891.957

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.506.891.957 dan Rp. 1.438.685.972. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.537.239	260.557.233	800.006	0,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.244.909.718	1.177.503.739	67.405.979	5,72

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	1.506.446.957	1.438.060.972	68.385.985	4,75
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	625.000	625.000	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.507.071.975	1.438.685.972	68.385.985	4,75

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 576.600

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	576.600	55.958	520.642	930,41
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	576.600	55.958	520.642	930,41

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0

Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 299.116.023.303 dan Rp. 301.593.836.149.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. (12.452.279.539) dan Rp. (12.254.564.956). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.410.132.138 dan Rp. 10.965.921.928.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2019**

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(7.508.400)
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.975.606.661
Transfer Masuk	11.442.033.877
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	22.410.132.138

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp. (7.508.400) sedangkan DKEL sebesar Rp. 10.975.606.661.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, sebesar Rp. 11.442.033.877-. yang diterima sepanjang tahun 2019.

Rincian transfer masuk untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Transfer Masuk	Bentuk Transfer Masuk	Nilai Transfer Masuk
1	Mahkamah Agung RI	Barang	94.091.378
2	Pengadilan Tinggi Makassar	Tanah dan Bangunan	11.427.099.000

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 309.073.875.902 dan Rp. 300.305.193.121.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK dalam paoran keuangan semester I Tahun 2019.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual di semester I Tahun 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Makassar adalah :

1. MANDIRI KC. MAKASSAR KARTINI A/C 152-009603674-0 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099422) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0050-01001094-30-4 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099423) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.
3. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar A/C 00372-01-30-000042-4 a.n. RPL 136 PN Makassar Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 13.462.384.207.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi I DIPA Tanggal 30 April 2019 perubahan nilai akun untuk biaya kesehatan hakim ad hoc yang di tarik ke pusat.

2. Revisi II DIPA Tanggal 29 Mei 2019 penambahan belanja modal untuk pengadaan laptop sebesar Rp. 39.000.000,-
3. Revisi III DIPA Tanggal 28 Juni 2019 perbaikan halaman III DIPA

F.2.5. Ralat SPM,SSBP,dan SSPB

Tidak terdapat informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Terdapat Hibah dari Bank Tabungan Negara berupa barang alat penunjang operasional kantor senilai Rp. 77.000.000 yang belum di sahkan (Berita Acara Terlampir).

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Makassar
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	2019	Per 30 Juni 2019	Per 30 Juni 2019
A.	Peralatan dan Mesin		8.155.739.995	6.784.614.640	261.357.239	11.761.411	1.098.006.694
1	Alat Bantu	7	1.598.486.077	947.552.044	108.489.006	0	542.445.072
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	941.965.092	929.568.582	12.396.510	0	0
3	Alat Kantor	5	864.650.804	626.471.804	50.893.000	0	187.286.000
4	Alat Rumah Tangga	5	2.356.527.117	2.221.739.874	29.627.243	0	105.160.000
5	Alat Studio	5	322.264.305	295.577.701	5.898.604	0	20.788.000
6	Alat Komunikasi	5	14.681.000	14.681.000	0	0	0
7	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	-	-	-	-	-
8	Komputer Unit	4	1.614.398.645	1.418.823.834	36.757.864	0	158.816.947
9	Peralatan Komputer	4	440.966.955	328.399.801	17.295.012	11.761.422	83.510.720
10	Peralatan Olah Raga	3	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
B.	Gedung dan Bangunan		68.316.866.900	3.532.511.219	1.244.909.718	67.405.979	63.472.039.984
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	64.512.539.900	3.184.168.653	1.128.795.530	67.405.979	60.132.169.738
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	3.804.327.000	348.342.566	116.114.188	0	3.339.870.246
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
D.	Aset Tetap Lainnya		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0

1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	-	-	-	-	-
3	Barang Bercorak Kesenian	4	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
4	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	-	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		-	-	-	-	-
1	Alat Kantor	5	-	-	-	-	-
2	Alat Rumah Tangga	5	-	-	-	-	-
3	Alat Studio	5	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	5	-	-	-	-	-
5	Alat Kedokteran	5	-	-	-	-	-
6	Komputer Unit	4	-	-	-	-	-
7	Peralatan Komputer	4	-	-	-	-	-
8	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	-	-	-	-	-
9	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
1	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		76.474.106.895	10.318.625.859	1.506.266.957	79.167.401	64.570.046.678
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Negeri Makassar
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
1	BANK TABUNGAN NEGARA	BARANG	PPO	77.000.000	Belum	77.000.000	-
			Jumlah :	77.000.000	-	77.000.000	-

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan
Keuangan

005
01
1900
099422

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2019